



SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

*“Rencana Kerja Sekretariat DPRD
kabupaten Balangan
Tahun 2024”*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026. Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan ini kami susun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Balangan.

SEKRETARIS DPRD



H.TAMRIN,S.Ag.SE.M.AP

Pembina TK I

NIP.19731224 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD BALANGAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Balangan tahun 2022 dan capaian Renstra perangkat daerah	(TC.29)
2.2 Analisis Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2022.	(TC.30)
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.	
2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPd.	(TC.32)
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD	
3.3 Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.	
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024	(TC.33)

BAB V. PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat DPRD Balangan dalam periode tahun anggaran 2024.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2024 memuat program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Balangan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Semua dokumen perencanaan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra – SKPD) yang memuat visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra – SKPD di maksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD dengan menggunakan bahan Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun mengaju pada Renja Pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (RKUA) dan PPAS di dasarkan pada RKPD yang telah disusun sebelumnya, yang kemudian RKUA dan RPPAS inilah yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang – undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kaliman Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomo33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian , dan Evaluasi Pembanguna Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Renca Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat DPRD.
22. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022, tanggal 6 Juli 2022 Tentang RKPD 2023.
23. Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2022, tanggal 20 Juli 2022 Tentang Perubahan RKPD 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2024 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2024 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2024 dapat di capai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2024 disusun dengan sitematika berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD BALANGAN TAHUN LALU
	2.1 Evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD tahun 2022 dan capaian renstra .
	2.2 Analisis Kinerja Pelatyanan Perangkat Daerah.
	2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Balangan.
	2.4 Reviuw terhadap rancangan awal RKPD
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD BALANGAN
	3.1 Telaahan terhadap kebijakn nasional.
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD
	3.3 Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD BALANGAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Balangan tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Balangan pada tahun 2024 direncanakan melaksanakan 2 Program dengan 51 Sub Kegiatan pada tahun 2022.

Dengan capaian tingkat realisasi anggaran kedua program 102,13 % dengan kategori Capaian Sangat tinggi, akan tetapi capaian target kinerja per sub kegiatan 81,93 % di kategori tinggi ,ada beberapa sub kegiatan yang silfa anggaran nya cukup tinggi hal ini di sebabkan tingginya mobilitas perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD di wilayah Kalimantan sehingga biaya asumsi tiket dan hotel luar pulau Kalimantan tidak di gunakan,belanja makan minum rapat juga terdampak dari intensitas perjalanan dinas DPRD yang di lakukan , gaji tenaga THL yang semula di angrgran penambahan untuk 90 orang tidak sesuai realisasi penambahan THL nya yang masuk, selain hal tersebut silfa yang cukup tinggi pada belanja tunjangan rumah jabatan untuk wakil ketua DPRD yang tidak dapat di realisasi di sebabkan legalitas peruntukan rumah jabatan untuk wakil ketua DPRD belum di terima serta silfa pada gaji dan tunjangan DPRD hal ini di sebabkan perubahan besaran tunjangan TKI dan reses menyesuaikan KKD (kondisi keuangan daerah) yang di dikeluarkan oleh kepala daerah sehingga pembayaran tunjangan DPRD ikut menyesuaikan. Berikut kami sampaikan hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Balangan tahun 2022 pada tabel TC.29 di bawah ini :

Tabel TC.29

Program dan kegiatan Tahun 2022

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Balangan

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out comes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	02	Sekretariat DPRD									
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAKABUPATEN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	75 Baik	56 Baik	65 Baik	63,15 Baik	97,15 peren	70 Baik	
				Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
				Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
				Prosentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	30 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80 Dokumen	60 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen				1 Dokumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100 Persen	2 Paket		
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	348 Orang / Kegiatan	21 Orang / Kegiatan	80 Orang / Kegiatan	53 Orang / Kegiatan	66,25 persen	75 Orang/Kegiatan		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum perangkat daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 paket	7 paket	4 paket	4 paket	100 Persen	3 Paket		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100 Persen	4 paket		
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket					4 Paket		
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket					6 Paket		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	3 paket	5 paket	5 paket	100 Persen	4 paket		
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen		
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket					2 Paket		
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan					20 Laporan		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	250 Laporan	250 Laporan	235 Laporan	94 persen	250 Laporan		
4.02.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang disediakan	10 Paket	4 Paket	8 Paket	7 Paket	87,50 persen			
4.02.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan			6 Laporan		
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 Persen	
4	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 Unit	15 Unit	20 Unit	18 Unit	90 Persen	6 Unit
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit			20 Unit		
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			20 Unit		
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 Unit	6 Unit	12 Unit	12 Unit	100 Persen	6 Unit
4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang menerima hak dan keuangan DPRD	125 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	25 Orang / Bulan	100 Persen	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	21 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100 Persen	5 Paket
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75 Orang			25 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	14 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	13 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	23 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	23 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	22 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	13 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75 persen	4 Laporan		
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75 persen	4 Laporan		
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	2 Laporan	0 0	0 0	0 persen	4 Laporan		
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	3 Laporan		
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	20 Laporan	0 Laporan	0 0	0 0	0 persen	4 Laporan		
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut	5 Laporan	0 Laporan	0 0	0 0	0 persen	1 Dokumen		
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75 persen	3 Dokumen		
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	2 Laporan		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	375 Orang / Kegiatan	75 Orang / Kegiatan	75 Orang / Kegiatan	60 Orang / Kegiatan	80 persen	75 Dokumen		
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi	66 Dokumen	13 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	100 Persen	52 Dokumen		
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Perangka Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan (Perangka Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perangka Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)					
					Target Perangka Daerah tahun (2022)	Realisasi Perangka Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Perangka (%)				
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	5 Dokumen		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat diakomodir (Di bahas) Oleh DPRD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	250 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	30 Laporan	60 persen	57 Laporan		
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 persen	2 Dokumen		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	375 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	100 Persen	75 Dokumen		
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Dokumen Kerja sama antar daerah yang di setujui	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	350 Dokumen	100 Dokumen	70 Dokumen	45 Dokumen	64,29 persen	70 Dokumen		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	500 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	85 Dokumen	85 persen	15 Dokumen		
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	210 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	30 Laporan	71,43 persen	42 Laporan		
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen		
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	225 Dokumen	40 Dokumen	45 Dokumen	32 Dokumen	71,11 persen	45 Dokumen		

2.2. Analisis Kinerja pelayanan Perangkat daerah.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Balangan memberikan pelayanan dan fasilitasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta mempertanggungjawabkan secara penggunaan kebijakan dan anggaran kepada Kepala Daerah.

Sehingga Sekretaris DPRD Balangan sebagai pimpinan di Sekretariat DPRD Balangan menetapkan kinerja utama sasaran ;

“ Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “

Indikator Utama Kinerja yaitu :

- Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
- Peningkatan Nilai SAKIP

Dari analisis pelaksanaan pelayanan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sekretariat DPRD Balangan telah mengalami peningkatan perbaikan pelayanan dan penyajian laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di laporkan setiap tahun nya. Berikut kami lampirkan tabel TC.30

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Balangan

NO	Indikator	SPM	IKU/IKM	NSPK / Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SKM Permenpan No.17 tahun 2017	Tingkat kepuasan anggota DPRD pelayanan Sekretariat DPRD	Kuesioner Permenpan no 17 tahun 2017	65	70	73	75	83	86,90			
			Peningkatan Nilai SAKIP		62	65	70	72	63,15	63,15 *			

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian renstra dan penelaahan terhadap tugas ,fungsi dan kewenangan maka dapat di sampaikan bahwa permasalahan di Sekretariat DPRD adalah :

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi	Permasalahan yang di hadapai
Umum dan keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Lemahnya manajemen penanganan administrasi surat menyurat.2. Keberadaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip dan barang milik daerah yang tidak memadai.3. Tidak terkelolanya database dokumentasi .4. Kemampuan dan kesiapan dalam verifikasi data yang perlu di pertajam dan lebih teliti.5. Penguasaan teknologi informasi pegawai masih rendah dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas.
Persidangan dan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan prasarana persidangan yang belum optimal.2. SDM yang kurang memadai dan responsive dalam pelayanan persidangan dan produk hukum.3. Pola Penanganan keprotokolan yang belum professional dan tepat.
Fasiltasi Penganggaran dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya kemampuan teknis aparat dalam mengelola dan menganalisis data fasilitasi rapat anggran dan pengawasan kegiatan DPRD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan Kerjasama yang baik dari semua masyarakat (Stakeholders), Instansi Vertikal, eksekutif maupun legislative, sehingga proses perencanaan pembangunan yang di hasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setuju di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah di tetapkan. Hal itu, di sebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tabel TC-31 ini di susun berdasarkan hasil entry renja di SIPD yang di susun berdasarkan hasil realisasi anggaran tahun 2022. Ada beberapa kegiatan yang kami sesuaikan sesuai dengan sub kegiatan maupun kepmen 050_5889 yang di tahun 2022 belum masuk dalam renja tahun 2022.

Berikut hasil rancangan tabel TC.31 Sekretariat DPRD Balangan tahun 2024.

Tabel 13.A.1
 Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi Manajemen
 Kabupaten Selong
 Nama Perangkat Daerah Kabupaten DPM Kabupaten Selong
 Tahun 2014-2015

No	Uraian/ Bidang Uraian Pelaksanaan Daerah dan Program/ Kegiatan	MENCANGKAWA LINDO				MAMBAKINER KEBUDUKUN				
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sedikitnya Dana (Rp) / Indikat	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sedikitnya Dana (Rp) / Indikat	
										10
1.0										
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEHUTANAN DAERAH PROVINSI	Seluasnya SPKD	1. Penegakan Kebijakan terhadap pelaksanaan urusan kehutanan di tingkat SPKD 2. Monev SPKD	75	27,543,251,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEHUTANAN DAERAH PROVINSI	Seluasnya SPKD	1. Penegakan Kebijakan terhadap pelaksanaan urusan kehutanan di tingkat SPKD 2. Monev SPKD	75	27,543,251,000
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	100%	84,411,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	100%	84,411,000
01	Perencanaan Dokumen/Perencanaan Perangkat Daerah		terdapat Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	31,371,000	Perencanaan Dokumen/Perencanaan Perangkat Daerah		terdapat Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	31,371,000
02	Kerangka Dasar Perencanaan Dokumen SKA - SMDP		terdapat Dokumen SKA SMDP dan Laporan Hasil Kerangka Perencanaan Dokumen SKA SMDP	Dokumen	25,333,000	Kerangka Dasar Perencanaan Dokumen SKA - SMDP		terdapat Dokumen SKA SMDP dan Laporan Hasil Kerangka Perencanaan Dokumen SKA	Dokumen	25,333,000
03	Kerangka Dasar Perencanaan Dokumen Perakuda SKA SMDP		terdapat Dokumen Perakuda SKA SMDP dan Laporan Hasil Kerangka Perencanaan Dokumen Perakuda SKA SMDP	Dokumen	6,376,000	Kerangka Dasar Perencanaan Dokumen Perakuda SKA SMDP		terdapat Dokumen Perakuda SKA SMDP dan Laporan Hasil Kerangka Perencanaan Dokumen Perakuda SKA SMDP	Dokumen	6,376,000
04	Kerangka Dasar Perencanaan DPA SMDP		terdapat Dokumen DPA SMDP dan Laporan Hasil Kerangka Perencanaan Dokumen DPA SMDP	Dokumen	21,071,000	Kerangka Dasar Perencanaan DPA SMDP		terdapat Dokumen DPA SMDP dan Laporan Hasil Kerangka Perencanaan Dokumen DP	Dokumen	21,071,000
05	Kerangka Dasar Perencanaan Perakuda DPA - SMDP		terdapat Dokumen Perakuda DPA SMDP dan Laporan Hasil Kerangka Perencanaan Dokumen Perakuda DPA SMDP	Dokumen	21,071,000	Kerangka Dasar Perencanaan Perakuda DPA - SMDP		terdapat Dokumen Perakuda DPA SMDP dan Laporan Hasil Kerangka Perencanaan D	Dokumen	21,071,000
06	Koordinasi dan Pengaturan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD		terdapat laporan capaian kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD dan laporan Hasil Koordinasi dan Pengaturan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD	Laporan	271,970,000	Koordinasi dan Pengaturan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD		terdapat laporan capaian kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Pengaturan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD	Laporan	271,970,000
07	Teknis Kerja Perangkat Daerah		terdapat Laporan teknis kerja Perangkat Daerah	Laporan	40,370,000	Teknis Kerja Perangkat Daerah		terdapat Laporan teknis kerja Perangkat Daerah	Laporan	40,370,000
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Waktu Tertinggalnya administrasi dan pelaporan keuangan SPKD	Bulan	3,170,376,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Waktu Tertinggalnya administrasi dan pelaporan keuangan SPKD	Bulan	3,170,376,000
01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN		www.www.www.www.www.www	08	1,136,341,000	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN		www.www.www.www.www.www	08	1,136,341,000
02	Pengadaan Administrasi Publik sesuai tugas		terdapat Dokumen hasil Proses dan dokumentasi Publik sesuai Tugas ASN	Dokumen		Pengadaan Administrasi Publik sesuai tugas		terdapat Dokumen hasil Proses dan dokumentasi Publik sesuai Tugas ASN	Dokumen	
03	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Keuangan SPKD		terdapat Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terhadap Keuangan SPKD	Dokumen	60,000,000	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Keuangan SPKD		terdapat Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terhadap Keuangan SPKD	Dokumen	60,000,000
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SPKD		terdapat Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Anggaran SPKD	Dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SPKD		terdapat Dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Anggaran SPKD	Dokumen	
05	Koordinasi dan Pengaturan Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran SPKD		terdapat laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SPKD dan laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran SPKD	Laporan	60,000,000	Koordinasi dan Pengaturan Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran SPKD		terdapat laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SPKD dan laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran SPKD	Laporan	60,000,000
06	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran SPKD		terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPKD dan laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran SPKD	Dokumen	11,230,000	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran SPKD		terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPKD dan laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran SPKD	Dokumen	11,230,000
07	Koordinasi dan Pengaturan Laporan Keuangan ASN Tahun SPKD		terdapat laporan keuangan ASN Tahun SPKD dan laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran Laporan ASN Tahun SPKD	Laporan	22,330,000	Koordinasi dan Pengaturan Laporan Keuangan ASN Tahun SPKD		terdapat laporan keuangan ASN Tahun SPKD dan laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran Laporan ASN Tahun SPKD	Laporan	22,330,000
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program dan Pelaksanaan Anggaran		terdapat Dokumen Pelaporan dan Analisis Program dan Pelaksanaan Anggaran	Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program dan Pelaksanaan Anggaran		terdapat Dokumen Pelaporan dan Analisis Program dan Pelaksanaan Anggaran	Dokumen	
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Perencanaan Tersusunnya Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	9,120,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Perencanaan Tersusunnya Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	9,120,000
01	Perencanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SPKD		terdapat Perencanaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SPKD	Dokumen		Perencanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SPKD		terdapat Perencanaan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SPKD	Dokumen	
02	www.www.www.www.www.www		www.www.www.www.www.www	Dokumen		www.www.www.www.www.www		www.www.www.www.www.www	Dokumen	
03	Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SPKD		terdapat Laporan Hasil Pelaksanaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SPKD	Laporan		Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SPKD		terdapat Laporan Hasil Pelaksanaan Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SPKD	Laporan	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SPKD		terdapat Laporan dan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPKD	Laporan		Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SPKD		terdapat Laporan dan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPKD	Laporan	
05	www.www.www.www.www.www		www.www.www.www.www.www	Laporan	22,330,000	www.www.www.www.www.www		www.www.www.www.www.www	Laporan	22,330,000
06	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD		terdapat Laporan dan Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD	Laporan		Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD		terdapat Laporan dan Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD	Laporan	
07	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD		terdapat Laporan dan Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD	Laporan	11,000,000	Penyusunan dan Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD		terdapat Laporan dan Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah pada SPKD	Laporan	11,000,000
1.04	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah		Perencanaan Tersusunnya administrasi perangkat daerah	100%	9,120,000	Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah		Perencanaan Tersusunnya administrasi perangkat daerah	100%	9,120,000

Kelompokan anggaran ini akan di realisasikan melalui kegiatan lain

BALANGAN BALANGAN				BALANGAN BALANGAN						
No	Uraian/ Bidang/ Urusan/ Perencanaan Daerah dan Program/Target dan	Subsidi	Indikator Kinerja Program (Kategori)	Tanggal Capaian Kinerja	Selakuhan	Uraian/ Bidang/ Urusan/ Perencanaan Daerah dan Program/Target dan	Subsidi	Indikator Kinerja Program (Kategori)	Tanggal Capaian Kinerja	Selakuhan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02				Paket	17,140,000					
11	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Revisi Paket Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Orang	19,220,000	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Revisi Paket Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Orang	19,220,000
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	3,736,912,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	3,736,912,000
01	Pengembangan Sistem Informasi		Paket	11,427,000		Pengembangan Sistem Informasi		Paket	11,427,000	
02	Pengembangan Sistem Informasi		Paket	1,120,000,000		Pengembangan Sistem Informasi		Paket	1,120,000,000	
03	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Paket	220,700,000		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Paket	220,700,000	
04	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Paket	1,000,000,000		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Paket	1,000,000,000	
05	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Paket	1,116,300,000		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Paket	1,116,300,000	
06	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Dokumen	1,116,300,000		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Dokumen	1,116,300,000	
07	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Paket	1,116,300,000		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Paket	1,116,300,000	
08	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Laporan	1,116,300,000		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Laporan	1,116,300,000	
09	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Laporan	1,116,300,000		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Laporan	1,116,300,000	
11	Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Dokumen	1,116,300,000		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024		Dokumen	1,116,300,000	
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang diadakan	Unit	14,996,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang diadakan	Unit	14,996,000
	Pengadaan Kendaraan Peranginan Dinas dan Kendaraan Dinas Sederajat		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000	Pengadaan Kendaraan Peranginan Dinas dan Kendaraan Dinas Sederajat		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000
	Pengadaan Motor		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000	Pengadaan Motor		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000
	Pengadaan Perahu dan Motor Perahu		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000	Pengadaan Perahu dan Motor Perahu		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000
	Pengadaan Alat Transportasi		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000	Pengadaan Alat Transportasi		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000
	Pengadaan Alat Transportasi		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000	Pengadaan Alat Transportasi		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000
	Pengadaan Gasing Kuda dan Baganan Lempay		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000	Pengadaan Gasing Kuda dan Baganan Lempay		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000
	Pengadaan Perahu dan Motor Perahu		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000	Pengadaan Perahu dan Motor Perahu		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000
	Pengadaan Perahu dan Motor Perahu		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000	Pengadaan Perahu dan Motor Perahu		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	14,996,000
1.08	Pengadaan Jasa Peranginan Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Pengadaan Jasa Peranginan Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	1,000,000,000	Pengadaan Jasa Peranginan Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Pengadaan Jasa Peranginan Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	1,000,000,000
01	Pengadaan Jasa Sewa Mesruwal		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Laporan	1,000,000,000	Pengadaan Jasa Sewa Mesruwal		Laporan	1,000,000,000	
02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Laporan	1,000,000,000	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan	1,000,000,000	
03	Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan dan Perbaikan Kandang yang Dikelola		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Laporan	1,000,000,000	Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan dan Perbaikan Kandang yang Dikelola		Laporan	1,000,000,000	
04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Laporan	1,000,000,000	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	1,000,000,000	
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	1,000,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	1,000,000,000
01	Pemeliharaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	1,000,000,000	Pemeliharaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak		Unit	1,000,000,000	
02	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	1,000,000,000	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan		Unit	1,000,000,000	
03	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	1,000,000,000	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan		Unit	1,000,000,000	
05	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan		Revisi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024	Unit	1,000,000,000	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan		Unit	1,000,000,000	

No	Uraian Bidang, Uraian Pekerjaan dan Deskripsi Program/Tingkatan	RANCANGAN WAKIL DPRD				RANCANGAN KEGIATAN			
		Sekolah	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Tingkat Kegiatan	Subsidiar Dana (Rp) (Miliar)	Sekolah	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Tingkat Kegiatan	Subsidiar Dana (Rp) (Miliar)
1.6	Menyusun dan melaksanakan program kerja	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
06	Menyusun dan melaksanakan program kerja	06	06	06	06	06	06	06	06
07	Menyusun dan melaksanakan program kerja	07	07	07	07	07	07	07	07
08	Menyusun dan melaksanakan program kerja	08	08	08	08	08	08	08	08
09	Menyusun dan melaksanakan program kerja	09	09	09	09	09	09	09	09
10	Menyusun dan melaksanakan program kerja	10	10	10	10	10	10	10	10
1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Pelayanan: Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Gabun	10.744.000.000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Pelayanan: Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Gabun	10.744.000.000	
01	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	08	11.795.200.000	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	08	11.795.200.000	
02	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Paket Paket kepegawaian DPRD yang diterima	Paket	3.970.000.000	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Paket Paket kepegawaian DPRD yang diterima	Paket	3.970.000.000	
03	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Orang yang menerima hak keuangan DPRD	Orang	2.010.000.000	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Orang yang menerima hak keuangan DPRD	Orang	2.010.000.000	
1.16	Layanan Administrasi DPRD	Waktu Pelayanan: Layanan Administrasi DPRD	Gabun	7.518.000	Layanan Administrasi DPRD	Waktu Pelayanan: Layanan Administrasi DPRD	Gabun	7.518.000	
	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	1.170.000.000	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	1.170.000.000	
	LAPORAN DAN LAMPIRAN	jumlah Laporan dan Lampiran DPRD	Laporan	10.000.000	LAPORAN DAN LAMPIRAN	jumlah Laporan dan Lampiran DPRD	Laporan	10.000.000	
	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Paket kepegawaian DPRD yang diterima	Paket	3.200.000.000	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Paket kepegawaian DPRD yang diterima	Paket	3.200.000.000	
02	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Orang yang menerima hak keuangan DPRD	Orang	2.010.000.000	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Orang yang menerima hak keuangan DPRD	Orang	2.010.000.000	
	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	85	10.000.000.000	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	85	10.000.000.000	
	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		
	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		
	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		
	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		
	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		
	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		
	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		
	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%		
1.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	1.000.000.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	PROSES DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	1.000.000.000	
01	Pengusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	1.170.000.000	Pengusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	1.170.000.000	
02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	3.100.000.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	3.100.000.000	
03	Pengawasan Kapan Pengawasan Urusan	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	2.010.000.000	Pengawasan Kapan Pengawasan Urusan	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	2.010.000.000	
04	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	2.010.000.000	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	2.010.000.000	
05	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	2.010.000.000	Kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	2.010.000.000	
1.02	Pembahasan Rancangan Anggaran	1. PEMBANTUAN PERANGKAT DAERAH PERSARANAN PROSES PEMBANTUAN PERANGKAT DAERAH 2. PEMBANTUAN PERANGKAT DAERAH PERSARANAN PROSES PEMBANTUAN PERANGKAT DAERAH	100%	314.910.000	Pembahasan Rancangan Anggaran	1. PEMBANTUAN PERANGKAT DAERAH PERSARANAN PROSES PEMBANTUAN PERANGKAT DAERAH 2. PEMBANTUAN PERANGKAT DAERAH PERSARANAN PROSES PEMBANTUAN PERANGKAT DAERAH	100%	314.910.000	
01	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	
02	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	
03	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	
04	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	
05	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	Pembantuan RUP dan PPS	jumlah Dokumen hak kepegawaian dan urusan kepegawaian DPRD	Dokumen	11.000.000	

Kelompokan kegiatan ini akan dilaksanakan oleh seluruh unsur organisasi yang ada di lingkungan DPRD Balangan.

REKAM JEK KEGIATAN					REKAM JEK KEGIATAN				
No	Deskripsi Kegiatan	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan	No	Deskripsi Kegiatan	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan
01	Penyusunan Rencana Kerja Murni Sekretariat DRD Balangan Tahun 2024	Menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur	Adanya dokumen rencana kerja yang lengkap	Januari - Februari 2024	02	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kerja Murni Sekretariat DRD Balangan Tahun 2024	Menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akurat	Adanya dokumen laporan pertanggungjawaban yang lengkap	Desember 2024
03	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kerja Murni Sekretariat DRD Balangan Tahun 2024	Menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akurat	Adanya dokumen laporan pertanggungjawaban yang lengkap	Desember 2024	04	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kerja Murni Sekretariat DRD Balangan Tahun 2024	Menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akurat	Adanya dokumen laporan pertanggungjawaban yang lengkap	Desember 2024
JUMLAH					JUMLAH				

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2024, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (Musrenbang Kabupaten) yang berpedoman pada isu Strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dari semua usulan program/ kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Sebagai SKPD yang mempunyai tugas sebagai fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Menyusun rancangan kerja dan anggaran mempedomani pada peraturan Pemerintah no 18 tahun 2017 tentang Hak dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD dan kepmen 050 _5889 tahun 2021.

Hasil usulan Musrenbang dan Reses yang telah dilaksanakan Anggota DPRD tersebut nantinya digunakan sebagai bahan untuk Menyusun Renja Perangkat Daerah yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum perangkat daerah yang di koordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan renja adalah sinkronisasi dan penyalarsan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Tabel usulan progrm dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun

Tabel T-C.32.

Usulan Pokir Masa Sidang I tahun 2023 Perurusan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan

No	usulan Pokir perurusan	Lokasi	SKPD Tujuan Akhir	SKPD Tujuan Awal	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sudah di validasi	Dinas PUPR	669	756	
2		Dinas ketahanan Pangan,Pertanian dan Perikanan	880	1221	
3		Dinas Kesehatan PPKB	0	9	
4		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	68	74	
5		Badan Penanggulangan bencana	0	15	
6		Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan persandian	8	8	
7		Dinas koperasi usaha kecil dan enengah perindustrian dan perdagangan	70	77	
8		Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu transmigrasi dan tenagakerja	9	6	
9		Dinas pendidikan dan kebudayaan	12	130	
10		Dinas pertahanan dan lingkungan hidup	0	1	
11		Dinas Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pemeberdayaan masyarakat desa.	0	44	
12		Dinas Perpustakaan dan kearsipan	1	0	
13		Dinas Perhubungan	18	0	
14		Sekretariat Daerah	6	206	
15		Dinas Perikanan	0	16	
16	Belum Validasi		822	0	SKPD tujuan belum terisi dengan lengkap
Jumlah Usulan Pokir			2563	2563	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.

Visi Presiden 2020-2024 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H.Ma'ruf amin adalah : ” ***Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat,Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*** ”. Visi tersebut di wujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang di kenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif,merata dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang bebas Korupsi,Bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan Bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih,efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai Strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi indonesia 2045,Presiden menetapkan lima arahan utama.Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM),Pembangunan infrastruktur,Penyederhanaan Regulasi,penyederhanaan Birokrasi, dan Transprormasi ekonomi.

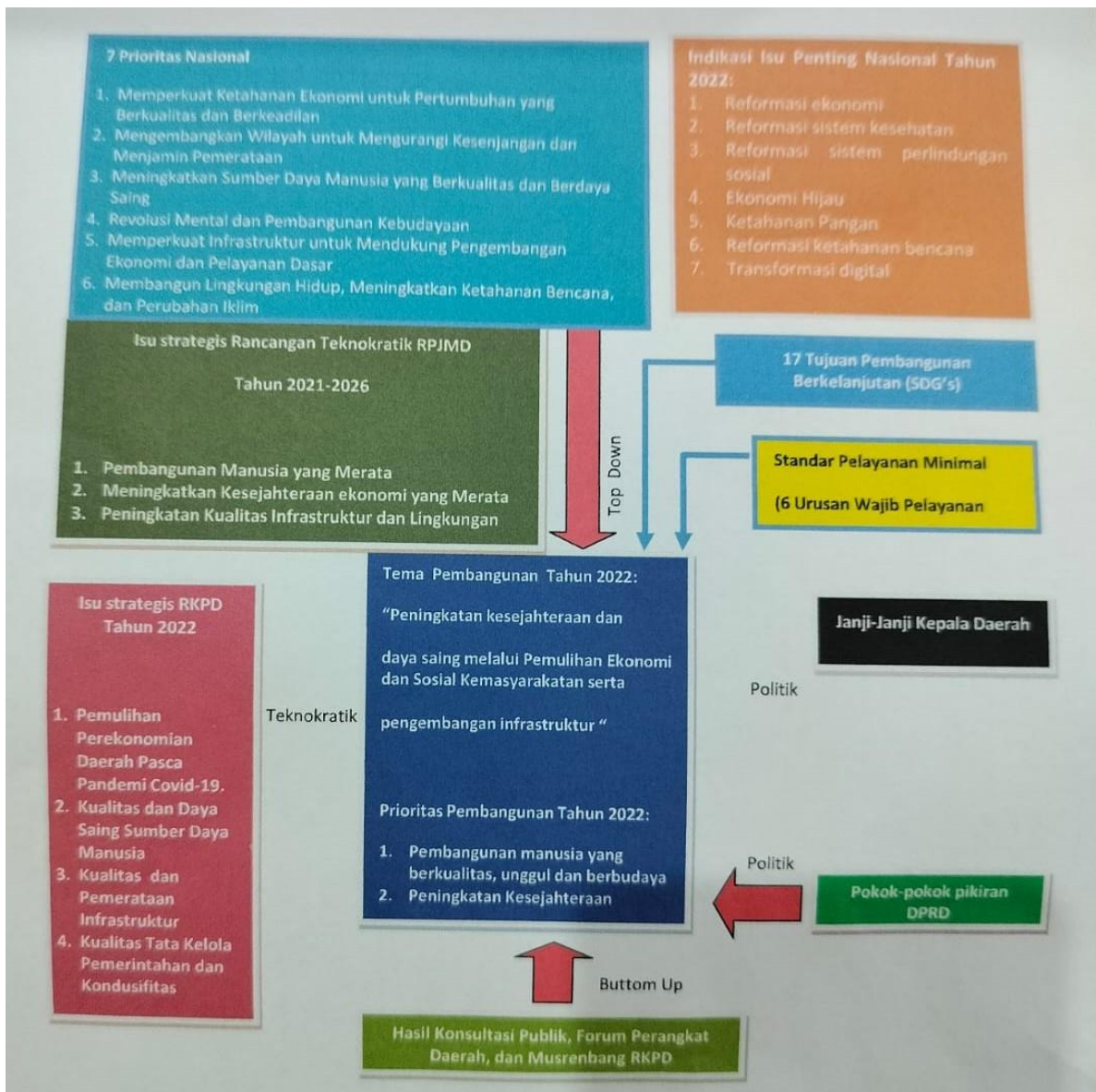
Dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024, visi dan misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemhkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transportasi pelayanan publik.

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 di lakukan dengan memperhatikan isu stategis rancangan teknokratik RPJMD kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026, indikasi isu Penting Nasional Tahun 2024, Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDG's). Standar Pelayanan Minimal, janji-janji kepala daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD

(pendekatan Politik), Serta hasil Konsultasi Publik (pendekatan Bottom up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini :



Arah kebijakan Pembangunan Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD tahun 2021 -2024 seperti tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2022**

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	1	Indeks infrastruktur publik
		2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	2	Indeks infrastruktur permukiman
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	3	Indeks Kualitas Air
				4	Indeks Kualitas Udara
				5	Indeks Kualitas Lahan
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
				7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
				8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
				9	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)
4	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	5	Menurunnya angka pengangguran terbuka	10	Angka Pengangguran Terbuka
5	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				12	Angka Harapan Lama Sekolah
		7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13	Usia Harapan Hidup
				14	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)
				15	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)
				16	Prevalensi Stunting
17	Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR)				
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18	NILAI SAKIP
				19	Opini BPK
				20	Nilai EKPPD
				21	Indeks Pelayanan Publik

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
7	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	9	Menurunnya Angka Kemiskinan	22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				23	Angka Kemiskinan
				24	Angka PPKS yang tertangani
		10	Bertahannya Angka Konflik Sosial Bemuansa SARA	25	Angka Konflik Sosial Bemuansa SARA
				11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
		27	Indeks Resiko Bencana		
12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya		
8	Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun	13	Meningkatnya status Desa Kabupaten Balangan	29	Indeks Desa Membangun

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana kerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang hendak di capai oleh Sekretariat DPRD Balangan, Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 4 (empat) yaitu : “Meningkatkan Kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara “. Dengan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
2. Menjadikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 sebagai bahan acuan penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD.

3. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam lima tahun ke depan

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2021- 2026 Menetapkan tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

"Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkaulitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target kinerja Sasaran Tahun 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2024
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatkan Pelayanan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	75	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indek kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	75
		Peningkatan Nilai SAKIP	Skor	72	Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	72

3.3. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor yang menjadi pertimbangan rancangan terhadap Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024 adalah dari Peraturan DPRD Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Bab V Rencana Kerja DPRD kabupaten Balangan Pasal 78 ayat (7) “ penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan “.

Atas dasar tersebut diatas rancangan kerja Sekretariat DPRD di upayakan mendekati dengan rancangan kerja DPRD.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024

Rencana kerja program dan kegiatan tahun 2024 di Sekretariat DPRD kabupaten Balangan di susun berdasarkan perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050_5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi,kodefikasi dan numenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam tabel di bawah ini rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan menyesuaikan pemutakhiran klasifikasi ada beberapa sub kegiatan yang tidak di laksanakan tetapi telah di sesuaikan perubahan maaping nya dari Kepmen sebelumnya

.

Berikut tabel TC.33 sebagai lampiran rencana kerja tahun 2024 dan Matrik Renja DPRD Balangan Tahun 2024.

Tabel TC33 rancangan tahun 2024

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
 Kabupaten : Balangan
 Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan
 Lembar dari

Kode	Urusan/Bidang/Usahan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting Page Ranswal	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10.00)
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRD	Peningkatan Nilai SAKIP	Sekretariat DPRD	72	33,877,625,461	APBD		74	34,065,686,007,10
		Presentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Peralatan		100%					
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Terasurnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan		100%	486,047,500			100%	534,652,250,00
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	31,191,000			Dokumen	34,310,10000
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	24,320,000			Dokumen	26,757,00000
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen	36,706,500			Dokumen	40,377,15000
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Dokumen	27,070,000			Dokumen	29,777,00000
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Dokumen	27,070,000			Dokumen	29,777,00000
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	271,970,000			Laporan	299,167,00000
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	67,720,000			Laporan	74,492,00000
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Tertuntasnya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD		Bulan	3,492,336,696			Bulan	3,841,572,565,00
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		OB	3,426,783,696			OB	3,769,402,06560
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen				Dokumen	-
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	10,650,000			Dokumen	11,715,00000
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen				Dokumen	-
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran - SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	18,335,000			Laporan	20,168,50000
06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen	14,250,000			Dokumen	15,675,00000
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	22,320,000			Laporan	24,552,00000
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen				Dokumen	-
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Terasurnya Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100%	36,320,000			100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Pencapaian Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting Pagi Awal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								(8)	(10.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10.000)
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				Dokumen	
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				Dokumen	
03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan				Laporan	
04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				Laporan	
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	23.320,000			Laporan	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				Laporan	
07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan	13.000,000			Laporan	
1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persebaran Tersedianya administrasi perangkat daerah		100%	794.220,000			100%	873.642,000,000
1	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket	375,000,000			Paket	412,500,000,000
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		Orang	419,220,000			Orang	461,142,000,000
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum		12 Bulan	3,786,072,000			12 Bulan	4,164,679,200,000
01	PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	141,677,000			Paket	155,844,700,000
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	1,419,000,000			Paket	1,560,900,000,000
03	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	220,500,000			Paket	242,550,000,000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	314,500,000			Paket	350,350,000,000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	120,750,000			Paket	132,825,000,000
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan		Dokumen	64,020,000			Dokumen	180,422,000,000
07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	104,700,000			Paket	115,170,000,000
08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan	115,000,000			Laporan	126,500,000,000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	1,181,925,000			Laporan	1,300,117,500,000
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen				Dokumen	-
11	Dukungan Peleaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen				Dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting Paga Rawal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang di sediakan		Unit	2.367.000.000			Unit	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			76.000.000				
3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			100.000.000				
4	Pengadaan Perabot dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit				unit	
5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		unit				unit	
6	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		unit				unit	
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit				unit	
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit				unit	
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit	1.000.000.000			unit	
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	3.962.596.000			Bulan	3.348.857.000.00
01	Penyediaan Jasa Simak Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan				Laporan	-
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	65.130.000			Laporan	716.470.000.00
03	Penyediaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penelitian dan Pengembangan Kantor yang Disediakan		Laporan	470.000.000			Laporan	473.000.000.00
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	1.981.298.000			Laporan	2.179.427.800.00
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	1.079.263.887			Bulan	2.177.192.435.38
01	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	637.015.887			Unit	300.717.475.70
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan		Unit	819.470.000			Unit	901.417.000.000
05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	78.000.000			Unit	85.800.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	57.000.000			Unit	62.700.000.000
07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit				Unit	-
08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Unit				Unit	-

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi		Unit			Unit	-
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi		Unit	387,780,000		Unit	426,558,000,000
1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Bulan	66,448,263,378		Bulan	18,533,089,715,000
01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		OB	15,791,363,378		OB	17,363,789,71,580
02	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		Paket	819,000,000		Paket	900,900,000,000
03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		Orang	344,000,000		Orang	368,400,000,000
1.16	Layanan Administrasi DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Bulan	527,500,000		Bulan	572,000,000,000
1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Dokumen	7,500,000		Dokumen	
2	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD		Laporan			Laporan	
3	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Laporan			Laporan	
4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		Paket	520,000,000		Paket	572,000,000,000
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPRD	75	17,795,144,384	8,898,441,300	85	19,574,658,624,40
		PRESENTASE RAPERDA YANG TELAH DISBAHAS OLEH DPRD DAN DISAMPAIKAN KE BAGIAN HUKUM		100%			100%	
		PRESENTASE KEGIATAN DPRD YANG TERPUBLIKASI DAN TERAKSES OLEH PUBLIK		100%			100%	
		PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		100%			100%	
		PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH		100%			100%	
		PRESENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIRI DI BAHAS OLEH DPRD		100%			100%	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Raperda yang telah di bahas oleh DPRD dan telah di sampaikan ke bagian hukum		100%	7,881,517,700		100%	7,789,669,470,00
01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Dokuman	1,170,450,000		Dokuman	1,297,395,000,000
02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		Dokuman	3,306,668,600		Dokuman	3,637,335,460,000
03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		Dokuman	2,051,210,000		Dokuman	2,256,331,000,000
04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik yang Difaasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difaasilitasi		Dokuman	252,814,100		Dokuman	278,095,510,000

Kode	Urusan/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Prakiraan Majo Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting Pjau Ramwal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									(10.00)
05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Dokuman	291.375.000		Dokuman		320.512.500.00
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. PERSENTASE JEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		100%	249.991.000		100%		274.998.100.00
		2. PERSENTASE JEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH		100%			100%		
01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Dokuman	13.808.000		Dokuman		15.188.800.00
02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Dokuman	12.452.200		Dokuman		13.697.420.00
03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Dokuman	84.306.800		Dokuman		92.737.460.00
04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		Dokuman	82.384.000		Dokuman		89.822.400.00
05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		Dokuman	11.942.800		Dokuman		13.137.080.00
06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Dokuman	45.097.200		Dokuman		49.606.020.00
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Perwakilan Rapat Kerja yang dilaksanakan dengan baik		100%	185.818.900		100%		203.528.790.00
01	Pengawasan Usuran Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Dokuman	30.151.500		Dokuman		33.166.650.00
02	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Dokuman	31.966.400		Dokuman		35.163.040.00
03	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Dokuman	18.042.000		Dokuman		19.846.200.00
04	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian		Dokuman	30.185.200		Dokuman		33.203.720.00
05	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Dokuman	15.616.000		Dokuman		17.177.600.00
06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pem eriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Dokuman	9.134.600		Dokuman		10.048.060.00
07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		Dokuman	28.519.200		Dokuman		31.371.120.00
08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Dokuman	21.404.000		Dokuman		23.544.400.00
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Perwakilan Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas		100%	2.846.715.000		100%		3.153.386.500.00
01	Orbitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		Dokuman	401.352.000		Dokuman		441.707.200.00
02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Dokuman	687.576.000		Dokuman		756.333.600.00
03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Dokuman	1.475.012.000		Dokuman		1.622.513.200.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Prakiraan Majo Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Postifng. Paga Raswal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10.00)
04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		orang				orang	-
05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		orang				orang	-
06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Dokuman	56.000,000			Dokuman	61.600,00000
07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Dokuman	246,575,000			Dokuman	271,252,50000
2.5	Penyempitan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PRESENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIRI DI BAHAS J OLEH DPRD		100%	2.058.439,004			100%	2.264.283,564,40
01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		laporan	57,150,000			laporan	62,965,00000
02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Dokuman	37,957,300			Dokuman	41,731,03000
03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Dokuman	1,963,332,304			Dokuman	2,189,687,53440
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyempitan Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		100%				100%	
01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Dokuman				Dokuman	
02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		laporan				laporan	
2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Penyempitan Dokumen Kerja sama antar daerah yang di setujui		100%	295,092,000			100%	324,601,200,00
01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi penyempitan kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Penyempitan Kerja Sama Daerah		Dokuman				Dokuman	
02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		Dokuman	295,092,000			Dokuman	324,601,20000
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	Penyempitan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD		100%	5.058,370,000			100%	5.564,207,000,00
01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Dokuman	4,563,320,000			Dokuman	5,019,652,00000
02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		laporan	70,050,000			laporan	77,053,00000
03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Dokuman	74,750,000			Dokuman	82,223,00000
04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Dokuman	350,250,000			Dokuman	385,275,00000
05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Dokuman				Dokuman	
J U M L A H						51,872,209,065		6,096,441,000	53,640,344,631,50

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya Sekretariat pada tahun 2024, sehingga upaya Sekretariat DPRD dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran aparat Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai acuan di dalam Rencana kerja DPRD Tahun 2024 melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan visi organisasi.

Semoga penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun Anggran 2024 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

SEKRETARIS DPRD

H.TAMRIN,S.Ag,SE.,M.AP

Pembina TK I

NIP.19731224 199403 1 007

LAMPIRAN